

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016 maka dapat disimpulkan kesimpulan :

1. Insentif eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Insentif eksekutif diukur dengan jumlah insentif yang diterima oleh para eksekutif perusahaan berupa gaji, bonus dan tunjangan lainnya. Semakin tinggi insentif yang diberikan perusahaan kepada eksekutif menyebabkan nilai CETR rendah, sehingga tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan meningkat.
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. BEI juga sudah menetapkan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari total anggota dewan komisaris. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak komisaris independen suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan yang akan dilakukan oleh para eksekutif perusahaan untuk meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah Republik Indonesia didalam perusahaan BUMN, maka akan semakin tinggi tingkat

- pengawasan dan akan mengelola perusahaan lebih baik sehingga tingkat *tax avoidance* dapat dikurangi.
4. Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin bagus kualitas audit suatu perusahaan diharapkan akan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Tetapi, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, sehingga KAP tersebut tidak mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).
  5. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR. Komite audit diproksikan dengan jumlah komite audit perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit suatu perusahaan maka akan semakin rendah nilai CETR sehingga peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin besar.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2016 sebagai sampel penelitian.
2. Penelitian ini pada variabel *tax avoidance* hanya menggunakan satu proksi yaitu *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa mekanisme *corporate governance* sebagai variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance*, terdiri dari insentif

eksekutif, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan komite audit.

4. Pada penelitian ini tidak semua perusahaan mencantumkan insentif berupa gaji, bonus dan tunjangan lainnya yang diterima oleh para eksekutif tersebut didalam laporan tahunan perusahaan.

### 5.3 Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat mendorong adanya penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan *tax avoidance*. Dengan melihat keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulisan memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Karena pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI saja, sebaiknya penelitian selanjutnya memperluas jumlah sampel penelitian. Sehingga dapat menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel independen yang terkait dengan *tax avoidance*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam mengukur *tax avoidance*, misalnya *book tax difference*.